



INFORMASI INDIKATOR KINERJA

DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA

[REVISI SEPTEMBER 2023]

PENGANTAR

Dalam rangka memberikan panduan dan informasi dalam penghitungan capaian indikator kinerja lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, telah menyusun informasi indikator kinerja. Dokumen ini merinci secara komprehensif sejumlah metode dan parameter yang akan menjadi panduan utama dalam mengevaluasi pencapaian dan kinerja selama tahun 2023.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya KEPMENKP Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diikuti dengan reformasi indikator kinerja utama (IKU) baik secara nomenklatur, sebaran, dan validitas IKU maka, dilakukan penyesuaian nomenklatur, target maupun metode pengukuran pada bulan September 2023. Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan revisi dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Pemantauan dan Operasi Armada dengan Direktur Jenderal PSDKP beserta dokumen kelengkapannya. Revisi dimaksud dilakukan sebagai sebuah komitmen Direktorat dalam menjaga kesinambungan akuntabilitas kinerja.

Sejalan dengan komitmen tersebut, formula pengukuran indikator kinerja ini tidak hanya mencerminkan standar keberhasilan, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi seluruh tim Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Kami percaya bahwa pengukuran yang tepat dan sistematis adalah kunci untuk mencapai sasaran.

Kami berharap bahwa formula pengukuran indikator kinerja ini akan memberikan pandangan yang lebih mendalam, memandu setiap langkah, dan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan diri demi keberlanjutan dan kesuksesan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada.

Dengan keyakinan yang teguh, kami menyampaikan Dokumen Formula Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2023 ini sebagai landasan untuk mencapai prestasi terbaik, memberikan pelayanan terbaik, dan menjaga integritas kami sebagai bagian integral dari kesuksesan Direktorat Jenderal PSDKP.

Jakarta, 1 September 2023
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada



DAFTAR INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas (Nilai)	80	IKU
Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (Indeks)	80	IKU
	3	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	IKU
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) (Indeks)	80	IKU
	5	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Sistem Pemantauan SDKP	100	IKU
Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	6	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	93	IKU
	7	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87.6	IKU
	8	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	IKU
	9	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)	70	IKU
	10	Persentase Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP (%)	100	IKU
Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	11	Persentase Prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	IKU
	12	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan (Indeks)	100	IKU
	13	Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	80	IKU

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
	14	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)	80	IKU
	15	Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada (inovasi)	1	IKU
	16	Persentase Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP (%)	100	IKU
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA	17	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100	IKM
	18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	78	IKM
	19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA (Nilai)	90	IKM
	20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	IKM
	21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)	99.4	IKM
	22	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21	IKM
	23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92	IKM
	24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA (%)	77,5	IKM
	25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA (%)	77,5	IKM

POHON KINERJA

DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA TAHUN 2023

Program:

Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Sasaran Strategis 7:

Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif

ISS: Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (97%)

SP1. Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat

SP2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif

SP3. Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif

SP4. Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif

IKP1.1: Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (73)

IKP1.2: Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (73)

IKP2.1: Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (87%)

IKP2.2: Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (87%)

IKP2.3: Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (80)

IKP2.4: Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (80)

IKP3: Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan (80)

IKP4: Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan (86)

SK1: Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

SK2: Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat

SK3: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

SK4: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

ISK1. Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas (Nilai 80)

ISK2. Indeks pengelolaan sistem pemantauan SDKP dan informasi intelijen (Indeks 80)

ISK3. Tingkat pemahaman peserta BIMTEK lingkup Dit POA (77%)

ISK4. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) (Indeks 80)

ISK5. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Sistem Pemantauan SDKP (100%)

ISK6. Indeks kinerja operasi pesawat patroli (Indeks 93)

ISK7. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks 87.6)

ISK8. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (100%)

ISK9. Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks 70)

ISK10. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Sistem Pemantauan SDKP (100%)

ISK11. Persentase Prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (100%)

ISK12. Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan (Indeks 100)

ISK13. Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai 80)

ISK14. Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai 80)

ISK15. Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada (1 inovasi)

ISK16. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Sistem Pemantauan SDKP (100%)

KETERANGAN:

ISS: Indikator Sasaran Strategis
 SP: Sasaran Program
 IKP: Indikator Kinerja Program
 SK: Sasaran Kegiatan
 ISK: Indikator Sasaran Kegiatan

INDIKATOR KINERJA 1.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Nilai adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;</p> <p>Nilai supervisi pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu meniliac capaian kegiatan superpisi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif;</p> <p>Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>Nilai supervisi pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Media PublikasiPenerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) POKMASWASKegiatan penilaian POKMASWAS teladan tingkat nasionalPendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan POKMASWAS oleh DKPSupervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWASPemutakhiran basis data POKMASWASMonitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS

Formula:

$$x = a + b + c + d + e + f + g$$

Keterangan:

x: Nilai Supervisi Pembinaan POKMASWAS

a : Media publikasi yang diterbitkan (bobot: 10)

b : Penerbitan KTA POKMASWAS (bobot: 10)

c : Pelaksanaan kegiatan penilaian POKMASWAS Teladan tingkat nasional (bobot: 20)

d : Kegiatan pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan (bobot: 15)

e : Kegiatan supervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWAS (bobot: 10)

f : Pemutakhiran basis data POKMASWAS (bobot: 20)

g : Kegiatan monitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS (bobot: 15)

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output
		(√) Kualitas/ Mutu
		() Waktu
		() Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi
		() Output Kendali Rendah
		() Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	a. Pengukuran IKU ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat POA.
		b. Supervisi dilakukan oleh Direktorat POA secara mandiri kepada Dinas KP Provinsi dan UPT lingkup Ditjen PSDKP terkait progress pembinaan yang dilakukan oleh Dinas KP Provinsi dan UPT kepada POKMASWAS.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

9. SUMBER DATA	:	a. Rekapitulasi penerbitan KTA POKMASWAS b. Dokumentasi kegiatan penilaian POKMASWAS Teladan tingkat nasional c. Laporan kegiatan pendampingan d. Laporan kegiatan supervisi terhadap pembinaan POKMASWAS e. Basis data POKMASWAS f. Laporan kegiatan pembinaan POKMASWAS oleh DKP
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2.

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (Indeks)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP digunakan untuk mengukur kesiapan SPKP dalam menyediakan data pemantauan kapal perikanan.
- Data hasil pemantauan dan informasi intelijen dikelola, diolah dan dianalisis untuk selanjutnya didistribusikan kepada user sebagai bahan operasi pengawasan SDKP.
- User/pengguna data hasil pemantauan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan antara lain:

(A) Operasi Armada	(B) Direktorat PPSDP	(C) UPT	(D) Direktorat PPSDK
Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Bahan Operasi Airborne Surveillance	Data kapal pengangkut ikan hidup	Data kapal perikanan	Data kapal perikanan di wilayah konservasi

Formula:

$$i_{dat} = \sum_{i=1}^4 f_i$$

Keterangan:

I_{dat} = Indeks Pengelolaan Sistem

n = Jumlah indeks kinerja

i = indeks Pemenuhan

f_i = faktor penghitung

Kriteria Penilaian:		
Nilai Interval	Score	Kriteria
0 - 25	IV	Tidak Siap
26 - 50	III	Siap Terbatas
51 - 80	II	Siap
81 - 100	I	Sangat Siap

Faktor Penghitung

<p>Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Operasi Airborne Surveillance (20%);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan data pemantauan untuk kegiatan kapal pengawas dan airborne surveillance • Perhitungan: $(12/12) \times 20\%$ 	<p>Pengolahan Data kapal perikanan (40%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis indikasi pelanggaran (bulanan) • Perhitungan: $(12/12) \times 40\%$
<p>Pengolahan Data Kapal Pengangkut Ikan Hidup (20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan data pemantauan kapal pengangkut ikan hidup (bulanan) • Perhitungan: $(12/12) \times 20\%$ 	<p>Pengolahan Data Kapal perikanan di wilayah konservasi (20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan data kapal perikanan di wilayah konservasi (bulanan) • Perhitungan: $(12/12) \times 20\%$

4. SATUAN PENGUKURAN	: Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	: (√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	: (√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	: a. Pengukuran IKU ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat POA.

- b. Pengelolaan sistem pemantauan SDKP dilakukan untuk memastikan Sistem Pemantauan SDKP operasional secara baik untuk digunakan sebagai sarana pemantau pergerakan kapal perikanan.
- c. Kendali lebih dominan oleh Internal Direktorat POA.

8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada		
9. SUMBER DATA	:	Data Vessel Monitoring System (VMS)		
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">a. IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA.b. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test).c. Peserta dari BIMTEK merupakan stakeholder.d. Stakeholder dalam hal ini adalah Para Pemilik Kapal Perikanan.e. BIMTEK lingkup Direktorat POA tahun 2023 yaitu: Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan ke stakeholder.

Formula:

$$n = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

n= Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK

a= Nilai hasil Post Test Peserta BIMTEK

b= Jumlah Peserta

Kriteria Penilaian :

Sangat Paham	76-100
Paham	66-75
Kurang Paham	51-65
Tidak Paham	0-50

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
-----------------------------	---	---

5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	<p>a. Capaian IKU ini sangat bergantung dari sejauh mana pemahaman peserta Bimtek yaitu Pelaku Usaha/Pemilik Kapal Perikanan terkait konten yang disampaikan.</p> <p>b. Peserta dari Bimtek ini merupakan para pemilik kapal perikanan dengan latar belakang Pendidikan yang berbeda-beda.</p> <p>c. Tingkat pemahaman sangat dipengaruhi oleh latar belakang Pendidikan peserta Bimtek.</p> <p>d. Pengukuran dilakukan oleh internal Direktorat POA dengan nilai bersumber dari nilai akhir tes pada saat BIMTEK dilaksanakan.</p>			
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada			
9. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Sosialisasi dan BIMTEK Aplikasi SPKP			
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 4.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), maka perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara transparan dan terbuka.</p> <p>b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran SKM secara kuantitatif dan kualitatif berupa angka atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya.</p> <p>c. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, unsur yang wajib diberikan penilaian memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur. Adapun 9 (sembilan) unsur tersebut adalah sebagai berikut: 1) Persyaratan pelayanan; 2) Prosedur pelayanan; 3) Waktu penyelesaian; 4) Biaya/tarif; 5) Produk pelayanan; 6) Kompetensi pelaksana; 7) Perilaku pelaksana; 8) Penanganan pengaduan; 9) Sarana dan prasarana.</p>

Formula:

$$x = \frac{a + b + c + d}{y}$$

Keterangan:

x = Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP

y = Jumlah IKM yang sudah dilaksanakan

a = Nilai indeks kepuasan masyarakat triwulan I

b = Nilai indeks kepuasan masyarakat triwulan II

c = Nilai indeks kepuasan masyarakat triwulan III

d = Nilai indeks kepuasan masyarakat triwulan IV

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3,07 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik
3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	a. Pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh faktor eksternal secara dominan. b. Indikator ini mengukur Kepuasan Masyarakat Pelaku Usaha (pemilik kapal perikanan) atas pelayanan perizinan SPKP, layanan fitur aplikasi, dan aspek manfaat dari penggunaan SPKP. c. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara survei kepada para pelaku usaha perikanan (pemilik kapal perikanan). d. Tercapai atau Tidaknya target IKU sangat bergantung dari hasil survei kepada masyarakat dimaksud (PUAS/TIDAK PUAS).

8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Hasil survey kepuasan masyarakat triwulanan
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Bidang sistem pemantauan SDKP (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang sistem pemantauan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan• Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan• Rancangan NSPK bidang sistem pemantauan SDKP pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i>.

Formula

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang sistem pemantauan SDKP pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA

x_n : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang sistem pemantauan SDKP pengawasan SDKP.

n : jumlah target rancangan NSPK bidang sistem pemantauan SDKP pengawasan SDKP yang diselesaikan.

INDIKATOR KINERJA 6.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada pesawat patroli udara.• Indeks Kinerja Operasional Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Kapal Perikanan yang Dipantau;2. Persentase Coverage Area Pengawasan;3. Persentase Capaian Hari Operasi;4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, Terkoordinasi, dan Interdiksi; dan9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP).

Untuk mengukur Indeks Kinerja Pesawat Patroli menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$i_{pp} = \sum_{i=1}^9 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

C_{ps} = Cakupan Pemantauan Pesawat Patroli

D = D (*distance*) adalah jarak aktual pemantauan pesawat patroli berdasarkan aplikasi *tracking*

R = R (*range*) adalah jangkauan pemantauan berdasarkan penglihatan visual dan kamera pemantauan

n = Jumlah periode patroli yang dilaksanakan

Variabel pembentuk perhitungan Indeks Kinerja Pesawat Patroli sebagai berikut:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang dipantau : (Bobot 20 %)
2. Persentase cakupan wilayah pengawasan (Bobot 20%)
3. Persentase capaian hari operasi (Bobot 20%)
4. Persentase jumlah tindak lanjut atas target operasi yang diberikan (Bobot 15%)
5. Persentase jumlah kapal yang divalidasi (Bobot 5%)
6. Persentase operasi di WPPNRI rawan IUUF dan KIA (571,711,716,717) (5%)
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi [Bobot 5%];
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, Terkoordinasi, dan Interdiksi [Bobot 5%];
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP) [Bobot 5%].

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (20%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi Pesawat Patroli secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN PENGUKURAN : Indeks

5. JENIS ASPEK TARGET : () Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK : () Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome

7. PENJELASAN VALIDITAS : Pencapaian IKU ini sangat dominan dipengaruhi dari faktor eksternal seperti:

- ketersediaan pesawat (masih sewa). Kita tidak dapat secara leluasa mendapatkan pesawat lain, mengingat spesifikasi yang dibutuhkan dalam operasi pemantauan udara memiliki kekhususan, seperti: adanya camera yang tertanam di pesawat untuk kebutuhan identifikasi objek (foto udara/perekaman).
- Cuaca, faktor cuaca tentunya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Beroperasi atau tidaknya pesawat sangat dipengaruhi faktor cuaca. Hal ini merupakan alasan yang tidak boleh diabaikan yaitu berkaitan dengan Keselamatan.
- Izin Terbang, perizinan berkaitan lalu lintas udara yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan *security clearance* yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pesawat pada saat akan terbang. Terkadang izin terbang ini butuh waktu yang lebih lama, karena butuh *diapprove* oleh pejabat berwenang, juga kadang terjadi antrian. Sehingga tentunya berpotensi menghambat rencana operasi. Untuk penerbangan terjadwal tentunya dapat diantisipasi dari jauh hari, akan tetapi dalam operasi pesawat patroli seringkali perubahan terjadi dengan cepat, karena adanya Target Operasi (TO) yang harus segera dilakukan validasi faktual (Photo udara / perekaman) dan hasilnya harus segera dikirim ke Nakhoda Kapal Pengawas untuk ditindaklanjuti.
- Dengan adanya kerentanan sebagaimana dijelaskan di atas, sangat berpengaruh pada pelaksanaan operasi pesawat dan tentunya berpengaruh terhadap pencapaian IKU "persentase cakupan pemantauan pesawat patroli WPPNRI" ..

8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada		
9. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Operasi Pesawat Patroli Udara 2023		
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas.Indeks Kinerja Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:<ul style="list-style-type: none">Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;Cakupan wilayah pengawasan;Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

i_{kp} = Indeks kinerja Kapal Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas

Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%

- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi Kapal Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	a. IKU ini digunakan untuk mengukur kinerja kapal pengawas (8 unit yang dioperasikan oleh Direktorat POA). b. Terdapat faktor eksternal, namun tidak dominan, sehingga validitas IK yang dipilih adalah Output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Operasi Kapal Pengawas 2023
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan, sedangkan Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api.</p> <p>Kegiatan Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas dilaksanakan oleh Satker yang mengoperasikan Kapal Pengawas yaitu Direktorat POA dan UPT PSDKP sesuai dengan jumlah Kapal Pengawas yang dikelola/dioperasikan.</p> <p>Dalam proses pemenuhan kebutuhan logistik dimaksud dibagi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan;Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan;Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan;Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan;Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan; danPemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan. <p>PENJELASAN PENCAPAIAN IKU</p> <ol style="list-style-type: none">Pemenuhan Kebutuhan BBM KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 30 % dibuktikan dengan Berita Acara Akhir Bulan setiap Kapal Pengawas yang menggambarkan :<ul style="list-style-type: none">Ketersediaan stok BBM pada tangki setiap kapal pengawas (walaupun kapal pengawas tersebut tidak melakukan operasi pengawasan dan menggunakan listrik darat saat standby di dermaga). Dengan adanya ketersediaan BBM

-
- dalam tangki setiap Kapal Pengawas, membuktikan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi;
- Banyaknya penggunaan/pemakaian BBM setiap Kapal Pengawas setiap bulan. Dengan adanya penggunaan/pemakaian BBM yang tertuang dalam Berita Acara Akhir Bulan menjelaskan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi untuk operasional kapal maupun melakukan gelar operasi pengawasan.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 20 % dibuktikan dengan **Dokumen Pembelian Minyak Pelumas** (Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas) yang diadakan setiap Kapal Pengawas. Pemenuhan kebutuhan minyak pelumas dilakukan sesuai prosedur pergantian setiap mesin kapal, yang mana setiap mesin kapal melakukan pergantian setiap 200 jam kerja mesin baik mesin induk maupun mesin bantu. Sehingga pemenuhan kebutuhan Pelumas KP dilakukan periode triwulan;
 3. Pemenuhan Bahan Makanan AKP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 25 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
 4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 15 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Air Bersih**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan Air Bersih dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
 5. Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (ATK dan Bahan Komputer) Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan ATK / Bahan Komputer dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
 6. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api Periode Triwulan dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Laporan SENJATA API dan AMUNISI**. Dokumen pemenuhan berupa Laporan Stock Opname Senjata Api dan Amunisi yang dilaporkan setiap Triwulan dari Kapal ke Kantor.
-

Formula:

$$\mathbf{Xp} = (30\% \cdot x_a) + (20\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c) + (15\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e) + (5\% \cdot x_f)$$

Keterangan:

x_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 65)

x_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 15)

x_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 10)

x_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 5)

x_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 3)

x_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 2)

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan BBM KP}}{\text{Target Pemenuhan BBM KP}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP}}{\text{Target Pemenuhan Pelumas KP}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Makanan AKP}} \times 100$$

$$x_d = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP}} \times 100$$

$$x_e = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP}} \times 100$$

$$x_f = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api}} \times 100$$

**Apabila terdapat perubahan anggaran target dianggap tercapai berdasarkan anggaran terbaru*

**Target dianggap tercapai jika stock masih tersedia diatas kapal pengawas*

Penjelasan Bobot:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan BBM KP dengan bobot: 65, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi dalam operasional Kapal Pengawas.
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP dengan bobot: 15, mempertimbangkan merupakan komponen utama dalam pemenuhan logistik personel;
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP dengan bobot: 10, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi kedua yang merupakan komponen utama dalam operasional Kapal Pengawas;
- 4) Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
- 5) Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP bobot: 3, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
- 6) Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api bobot: 2, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas.

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP. Tanpa adanya logistik BBM, Makanan, dan logistik lainnya tentu operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan.

Pemenuhan logistik ini tidak dapat dilepaskan dengan Rencana Operasi Kapal Pengawas. Rencana Operasi erat kaitannya dengan TARGET OPERASI. Target operasi sangat dipengaruhi oleh waktu untuk melaksanakan operasi dimaksud. Maka, peran ketersediaan logistik sangat dominan.

Dalam proses pemenuhan logistik dimaksud, sangat dipengaruhi oleh pihak lain secara dominan dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga terkait ketersediaan dan ketepatan waktu pengangkutan BBM dan adanya antrian kapal pada saat pengisian BBM.

Pemenuhan logistik khususnya BBM Kapal Pengawas BISA TIDAK TERPENUHI secara tepat waktu karena adanya faktor eksternal dimaksud.

8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada		
9. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Berita Acara BBM Akhir Bulan (Aplikasi Pengelolaan Logistik Kapal Pengawas). b. Dokumen Pembelian Minyak Pelumas. c. Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura. d. Dokumen Pemenuhan Air Bersih. e. Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer. f. Dokumen Pemenuhan Senjata Api. 		
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ol style="list-style-type: none">Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) adalah ukuran yang menggambarkan nilai rata-rata kesiapan PNS AKP (Kelas I – IV/KP. Akar Bahar) yang diambil berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat keahlian pelaut, sertifikat keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas sesuai jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara.Rujukan regulasi pemenuhan kesiapan PNS AKP antara lain: (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (b) Kepmen PAN dan RB No. 1103 Tahun 2022 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah.Nilai Indeks Kesiapan AKP merupakan gambaran kualitas pemenuhan kesiapan AKP yang diukur setiap tahun oleh Direktorat POA, Ditjen PSDKP.Kegiatan Kesiapan Awal Kapal Pengawas dilaksanakan oleh Direktorat POA.

Formula:

$$ika = (50\% \cdot x_a) + (25\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c) + (10\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e)$$

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Pendidikan AKP}}{\text{Target Pendidikan AKP}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Sertifikat Keahlian Pelaut AKP}}{\text{Target Sertifikat Keahlian Pelaut AKP}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Sertifikat Keterampilan Pelaut AKP}}{\text{Target Sertifikat Keterampilan Pelaut AKP}} \times 100$$

$$x_d = \frac{\text{Realisasi Psikotest Pemegang Senjata Api AKP}}{\text{Target Psikotest Pemegang Senjata Api AKP}} \times 100$$

$$xe = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan kesehatan (MCU) AKP}}{\text{Target Pemeriksaan kesehatan (MCU)AKP}} \times 100$$

Bobot Pengukuran Capaian:

- 1) Pendidikan (Bobot **50%**)
- 2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%)
- 3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%)
- 4) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 10%)
- 5) Pemeriksaan kesehatan (MCU) (Bobot 5%)

Penjelasan Bobot:

- 7) Pendidikan (Bobot 50%), Pendidikan mendapat bobot 50% karena menjadi persyaratan utama untuk menduduki jabatan di atas kapal pengawas.
- 8) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%), komponen keahlian menempati persyaratan kedua terbesar setelah pendidikan, karena komponen ini berpengaruh sangat dominan dalam penempatan Nakhoda dan Perwira di atas kapal pengawas.
- 9) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%), komponen ini merupakan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh AKP, sehingga mendapat bobot 10%.
- 10) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 10%), komponen ini merupakan persyaratan tambahan bagi AKP yang diberikan tanggungjawab tambahan untuk memegang senjata api. Tidak semua AKP memegang Senjata Api. Sehingga, mendapat bobot 10%.
- 11) Pemeriksaan kesehatan (MCU) (Bobot 5%), komponen ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan AKP secara berkala (bersifat update).

Keterangan:

ika : Indeks Kesiapan Awal Kapal Pengawas

x_a : Pemenuhan Pendidikan

x_b : Pemenuhan Sertifikat Keahlian Pelaut

-
- x_c : Pemenuhan Sertifikat Keterampilan Pelaut
 x_d : Pemenuhan Pemeriksaan Kesehatan (MCU)
 x_e : Pemenuhan Psikotest Pemegang Senjata Api

Kriteria Penilaian :	
80 - 100	Sangat Siap
60 - 80	Siap
0 - 60	Tidak Siap

1) Pendidikan (Bobot 35%)

Pendidikan diukur dari indikator pemenuhan pendidikan formal minimal yang telah dicapai oleh AKP dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan formal sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara antara lain :

- a. Pendidikan S-1 (Strata-Tiga)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pelayaran/Umum;
- b. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) bidang Pelayaran/Umum;
- c. Pendidikan SLTA/SMK bidang Umum / Pelayaran.

Kualifikasi Pendidikan Minimal	Nilai Kualifikasi	
	Memenuhi	Tidak Memenuhi
Pendidikan S-1/ D-4	1	0
Pendidikan D-3	1	0
Pendidikan SLTA/SMK	1	0

Memenuhi persyaratan pendidikan formal oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila tidak memenuhi persyaratan pendidikan formal maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%)

Sertifikat Keahlian diukur dari indikator riwayat mengikuti Sertifikasi Keahlian Pelaut AKP yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara, antara lain :

- a. ANT II / ANT III / ANT IV / ANT V;
- b. PDKN I / PDKN II / PDKN III;
- c. ANKAPIN I / ANKAPIN II / ANKAPIN III;
- d. ATT II / ATT III / ATT IV / ATT V;
- e. PMKN I / PMKN II / PMKN III;
- f. ATKAPIN I / ATKAPIN II / ATKAPIN III.

No	Sertifikat Keahlian (Minimal)	Nilai Kualifikasi	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	ANT II / ANT III / ANT IV / ANT V	1	0
2	PDKN I / PDKN II / PDKN III	1	0
3	ANKAPIN I / ANKAPIN II / ANKAPIN III	1	0
4	ATT II / ATT III / ATT IV / ATT V	1	0
5	PMKN I / PMKN II / PMKN III	1	0
6	ATKAPIN I / ATKAPIN II / ATKAPIN III	1	0

Memenuhi persyaratan Sertifikat Keahlian Pelaut oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Keahlian Pelaut maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%)

Sertifikat Keterampilan diukur dari indikator riwayat mengikuti Sertifikasi Keterampilan Pelaut AKP yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keterampilan Pelaut sesuai persyaratan Jabatan dan Kelas Kapal Negara, antara lain :

BST, AFF, SCRB, MFA, SAT, SSO, SDS, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS, ORU, MC, ECDIS, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT, ENGINE RESOURCE MANAGEMENT

<i>Medical Check UP</i> (MCU)	Nilai Kualifikasi	
	Sudah Melaksanakan	Belum Melaksanakan
Nama AKP	1	0

Sertifikat Keterampilan	Nilai Kualifikasi	
	Memenuhi	Belum Memenuhi
BST, AFF, SCRB, MFA, MC, SAT, SSO, SDS, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, ECDIS, GMDSS, ORU, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT, ENGINE RESOURCE MANAGEMENT.	1	Z/Y

Y = Jumlah Sertifikat Keterampilan Pelaut yang harus dipenuhi

Z = Jumlah Sertifikat Keterampilan Pelaut yang sudah dipenuhi

Memenuhi seluruh Sertifikat Keterampilan Pelaut oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi adalah 1, apabila belum terpenuhi semuanya maka Nilai Kualifikasi 0. Apabila terpenuhi sebagian maka Nilai Kualifikasi dihitung dengan cara membagi jumlah sertifikat yang sudah dipenuhi dengan jumlah sertifikat yang harus dipenuhi sesuai persyaratan jenjang jabatan, contoh : Syarat Sertifikat Keterampilan Pelaut Nakhoda Kapal Kelas III ada 6 Sertifikat Keterampilan Pelaut (BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF) tetapi Nakhoda yang bersangkutan baru memiliki 4 Sertifikat Keterampilan Pelaut maka Nilai Kualifikasi yang diperoleh oleh AKP tersebut adalah $4/6 = 0,666$ (dibulatkan jadi 0,67).

4) Pemeriksaan Kesehatan (MCU) (Bobot 15%)

Pemeriksaan Kesehatan AKP diukur dari indikator pelaksanaan *Medical Check UP* (MCU) yang dilakukan oleh setiap AKP.

Setiap AKP yang telah melaksanakan MCU maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila belum melaksanakan MCU maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

5) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 15%)

Psikotest Pemegang Senjata Api diukur dari indikator AKP dinyatakan lulus psikotest pemegang senjata api yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api

Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api	Nilai Kualifikasi	
	Memiliki	Belum Memiliki
Nama AKP	1	0

AKP yang memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api maka Nilai Kualifikasi adalah 1, apabila belum memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api maka Nilai Kualifikasi adalah 0.

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Pencapaian IKU ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA. Bersumber dari data kesiapan AKP : Pendidikan, Sertifikat Keahlian Pelaut, Sertifikat Keterampilan Pelaut, Pemeriksaan Kesehatan (MCU), dan Kartu Ijin Pinjam Pakai Senjata Api.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	a. E Pegawai KKP b. Data Base AKP c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kepelautan d. Laporan Hasil MCU/Rekapan Pelaksanaan MCU e. Data Pemegang Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata APi

10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan• Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan• Rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i>.

Formula

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA

x_n : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP.

n : jumlah target rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP yang diselesaikan.

INDIKATOR KINERJA 11.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Persentase prasarana dan sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan fisik/konstruksi pengadaan Sarana dan pembangunan Prasarana pengawasan SDKP.</p> <p>Prasarana pengawasan SDKP adalah bangunan gedung negara yang ada di UPT PSDKP antara lain: dermaga, gudang, gedung serba guna, dan pos pengawasan yang ada di UPT PSDKP, sedangkan Sarana pengawasan SDKP adalah Kapal Pengawas dan Speedboat pengawas</p> <p>Direktorat POA melaksanakan pengadaan Sarana Pengawasan SDKP, sedangkan pembangunan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan oleh UPT PSDKP. Peran Direktorat POA dalam proses pembangunan prasarana oleh UPT PSDKP yaitu dengan melakukan supervisi selama tahapan pembangunan, untuk memastikan pembangunan dilaksanakan tepat waktu serta sesuai kaidah pembangunan.</p> <p>Pengadaan sarana pengawasan SDKP di UPT sebanyak 2 (dua) unit yaitu Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 1 (satu) unit dan Stasiun PSDKP Tarakan sebanyak 1 (satu) unit.</p> <p>Pembangunan prasarana pengawasan SDKP di UPT sebanyak 4 (empat) unit yaitu Pangkalan PSDKP Bitung 1 (satu) unit, Stasiun PSDKP Kupang 1 (satu) unit, Stasiun PSDKP Belawan 1 (satu) unit, dan Stasiun PSDKP Cilacap 1 (satu) unit.</p> <p>Pengadaan sarana pengawasan SDKP oleh Direktorat POA berupa Kapal Pengawas Kelas II sebanyak dua unit, dilaksanakan secara <i>Multi Years Contract</i>/tahun jamak (tahun 2022 sampai dengan tahun 2023), Pengadaan dimaksud ditargetkan selesai pada tahun 2023, dengan formula sebagai berikut:</p>

Formula:

$$P_{sp} = \left(\frac{\sum a1 + a2}{b} \right)$$

Keterangan:

P_{sp} = Persentase prasarana dan sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)

$\sum a1 + a2$ = Jumlah persentase penyelesaian prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)

b = Jumlah prasarana dan sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Prasarana: a. Capaian Indikator atau presentase penyelesaian dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan prestasi kerja penyedia jasa. b. Prestasi kerja Penyedia Jasa sangat dipengaruhi oleh pihak luar seperti alat berat konstruksi (<i>backhoe, excavator, pile driver, concrete mixer truck</i>), material konstruksi dan peralatan lainnya yang bersifat impor (tidak ada hasil produk Indonesia). Sarana: a. Pencapaian IKU ini diperoleh dari jumlah Sarana Pengawasan (Kapal Pengawas Kelas II) yang diadakan; b. Capaian Indikator dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan prestasi kerja galangan. c. Prestasi Kerja Galangan juga sangat dipengaruhi oleh pihak luar seperti pabrikan Mesin Induk, Generator Set, dan peralatan lainnya yang bersifat impor (tidak ada hasil produk Indonesia)

- d. Kapal yang diadakan harus memenuhi peraturan konvensi internasional dan aturan nasional.
- e. Konvensi internasional dimaksud antara lain: SOLAS, MARPOL, COLREG, ICLL, TMS, IMO Code.

Apabila dalam pelaksanaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP dan pengadaan sarana pengawasan SDKP mengalami blokir anggaran, maka tidak dilakukan penilaian.

8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada		
9. SUMBER DATA	:	Dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, laporan konsultan pengawas/supervisi dan dokumen pembayaran		
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12.

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan (Indeks)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai kegiatan Pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan sehingga dapat dinyatakan Laik Operasional.
- Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 4 (empat) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas I, 3 (tiga) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas II dan 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas V.
- Pengukuran indeks kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP meliputi :
 - 1) Aspek Keselamatan
 - 2) Aspek Teknis
 - 3) Aspek Operasi

Yang dituangkan dalam sebuah laporan hasil survey yang dilakukan oleh **Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)** yang menyatakan Laik Operasional atau Tidak Laik Operasional

Formula:

$$L = (m. A_k) + (m. A_t) + (m. A_o)$$

Keterangan:

L = Laik Operasional

m Ak = Memenuhi Aspek Keselamatan (Nilai 1), Tidak Memenuhi (Nilai 0)

m At. = Memenuhi Aspek Teknis (Nilai 1), Tidak Memenuhi (Nilai 0)

m Ao. = Memenuhi Aspek Operasi (Nilai 1), Tidak Memenuhi (Nilai 0)

Kriteria		
Laik	:	Nilai =3
Tidak Laik	:	Nilai <3

FORM IDENTIFIKASI INDEKS KUALITAS PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN

ASPEK KESELAMATAN															
KAPAL PENGAWAS DITJEN PSDKP															
No	Nama Kapal	Kriteria													Penilaian
		Life Jacket	Sekoci	Lifebouy	Liferaft	Line throwing	Signing lamp	Parachute Signal	Red Hand	Smoke Signal	Fire and PMK	Pemadam	Baju Pemadam	Perl. Selam	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KAPAL BAJA															
1	KP. Orca 01	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi
2	KP. Orca 02	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi
3	KP. Orca 03	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi
4	KP. Orca 04	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi
5	KP. Hiu macan tutul 01	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi
6	KP. Hiu macan tutul 02	v	o	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi
7	KP. Paus 01	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi
KAPAL FIBREGLASS															
8	KP. Akar bahar 01	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi
Petunjuk Pengisian Aspek Keselamatan															
Life jacket						Penilaian									
o tidak ada						memenuhi (M)									
v ada dan berfungsi						- semua kriteria terpenuhi									
Lifebouy						memenuhi dengan syarat (MS)									
o tidak ada						- maksimal 2 item tidak memenuhi									
v ada dan berfungsi						tidak (T)									
Pemadam						- min 3 item tidak terpenuhi									
o tidak ada						<u>Keterangan</u>									
v ada dan berfungsi						FF = Fire Fighting									
S.O.S Equip						isi sesuai dengan kondisi									
o tidak ada						kotak formula tidak perlu diisi									

v	ada dan berfungsi
Liferaft	
o	tidak ada
v	ada dan berfungsi

ASPEK TEKNIS																												
KAPAL PENGAWAS DITJEN PSDKP																												
No	Nama Kapal	Kriteria																							Penilaian			
		Konstruksi							Sistem						Navkom						Kecepatan	Kapasitas tanki (ton)	FO Consumption	Jumlah mesin		Endurance (jam)	Usia Kapal (th)	
		Tebal plat		Sekat	Pondasi Mesin	Def	Korosi	Getaran Kapal	(M/T)	Mesin			Performa mesin	(M/T)	Radar	Radio Comm	GPS	ECDIS	EPIRB	(M/T)								
Hull	B.A	ME	AE							Elect																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	26	27	28	23	24	25	26
KAPAL BAJA																												
1	KP. Orca 01	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	v	memenuhi	v	138	657	2	105	v	2	MEMENUHI
2	KP. Orca 02	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	v	memenuhi	v	138	657	2	105	v	2	MEMENUHI
3	KP. Orca 03	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	v	memenuhi	v	138	657	2	105	v	2	MEMENUHI
4	KP. Orca 04	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	v	memenuhi	v	138	657	2	105	v	2	MEMENUHI
5	KP. Hiu macan tutul 01	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	v	memenuhi	o	51,7	510	2	51	v	10	MEMENUHI
6	KP. Hiu macan tutul 02	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	v	memenuhi	o	54	488	2	55	v	6	MEMENUHI
7	KP. Paus 01	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	v	memenuhi	o	365	107,2	2	1702	v	7	MEMENUHI
KAPAL FIBERGLASS																												
8	KP. Akar bahar 01	v	v	v	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	memenuhi	v	v	v	v	v	memenuhi	o	1	16,8	2	30	v	9	MEMENUHI

Petuniuk Pengisian Aspek Teknis															Penilaian						
Konstruksi					Sistem					Navkom					Kecepatan					Endurance	
Tebal Plat					Pompa					Radar, Radio, GPS, ECDIS, EPIRB					o penurunan kec > 5 knot					o < 20 jam	
Material Baja					o tidak berfungsi					o tidak berfungsi					v penurunan kec ≤ 5 knot					v ≥ 20 jam	
o berkurang lebih dari 4 mm					v berfungsi					v berfungsi											
v masih sama dan toleransi < 4 mm					Mesin ME/AE																
Material Fibre					o sering terjadi masalah/blankout										KETERANGAN						
o usia lebih dari 10 th					v berfungsi dengan baik										B.A = Bangunan Atas						
v usia kurang dari 10 th					Electrical										ME = Main Engine						
Def = Deformasi = Lendutan					o rentan terjadi arus pendek										AE = Auxiliary Engine						
o terdapat lendutan lebih dari 10 titik					v berfungsi dengan baik										Def = Deformasi						
v dibawah 10 titik					Performa Mesin																
Korosi, Getaran					o tidak baik																
o tinggi/banyak					v baik										isi sesuai dengan kondisi						
v kecil/sedikit															kotak formula (tidak perlu diisi)						

Penilaian	
Memenuhi (M)	
- memenuhi seluruh kriteria	
- memenuhi kriteria	
1. konstruksi	
2. sistem	
3. navkom	
4. perform	
Memenuhi dengan syarat (MS)	
- memenuhi beberapa kriteria saja	
(mak. 2 item tidak terpenuhi)	
Tidak Memenuhi (Tidak)	
- beberapa aspek tidak memenuhi	
1. konstruksi	
2. sistem	
3. navkom	
- seluruh aspek tidak memenuhi	

**ASPEK OPERASIONAL
KAPAL PENGAWAS DITJEN PSDKP**

No	Nama Kapal	Kriteria			Penilaian	
		Endurance (jam)	Kemampuan dan Kondisi Kapal	Penempatan Wilayah Operasi		
1	2	6	5	4	7	
KAPAL BAJA						
1	KP. Orca 01	105	v	ZEEI	memenuhi	
2	KP. Orca 02	105	v	ZEEI	memenuhi	
3	KP. Orca 03	105	v	ZEEI	memenuhi	
4	KP. Orca 04	105	v	ZEEI	memenuhi	
5	KP. Hiu macan tutul 01	51	v	ZEEI	memenuhi	
6	KP. Hiu macan tutul 02	55	v	ZEEI	memenuhi	
7	KP. Paus 01	1702	v	ZEEI	memenuhi	
KAPAL FIBERGLASS						
8	KP. Akar bahar 01	30	v	Ocean going	Laut Teritorial	memenuhi

Petunjuk Pengisian Aspek Operasi

Penempatan Wilayah Operasi

- Lokasi penempatan Kapal saat ini

Kemampuan dan Kondisi Kapal

- Didasari dari kemampuan dan kondisi kapal

Endurance

v : > 20 jam

o : < 20 Jam

Catatan:

Tidak memenuhi apabila penempatan wilayah operasi tidak sesuai dengan kemampuan dan kondisi kapal, hal ini juga terkait dengan endurance, kemampuan dan kondisi kapal

HASIL EVALUASI KELAIKAN OPERASIONAL

KAPAL PENGAWAS DIT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA, DIJEN PSDKP

No	Nama Kapal	Panjang	Usia	Kriteria Penilaian			Hasil
		(m)	(thn)	Keselamatan	Teknis	Operasional	
1	2	3	3	4	5	6	7
KAPAL BAJA							
1	KP. Orca 01	60	3	memenuhi	memenuhi	memenuhi	LAIK
2	KP. Orca 02	60	3	memenuhi	memenuhi	memenuhi	LAIK
3	KP. Orca 03	60	3	memenuhi	memenuhi	memenuhi	LAIK
4	KP. Orca 04	60	3	memenuhi	memenuhi	memenuhi	LAIK
5	KP. Hiu macan tutul 01	42	11	memenuhi	memenuhi	memenuhi	LAIK
6	KP. Hiu macan tutul 02	42	7	memenuhi	memenuhi	memenuhi	LAIK
7	KP. Paus 01	40	8	memenuhi	memenuhi	memenuhi	LAIK
KAPAL FIBERGLASS							
8	KP. Akar bahar 01	15	10	memenuhi	memenuhi	Memenuhi	LAIK
Keterangan							
-	LAIK	= Semua Aspek terpenuhi					
-	TIDAK LAIK	= Semua Aspek tidak terpenuhi					

4. SATUAN PENGUKURAN : Indeks

5. JENIS ASPEK TARGET : (√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	<p>a. Pencapaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh penilaian pihak eksternal yaitu Biro Klasifikasi Indonesia, sebagai badan usaha milik negara Indonesia yang diberi wewenang untuk mengklasifikasi kapal berbendera Indonesia untuk memberikan penilaian mengenai kelaiklautan kapal untuk berlayar.</p> <p>b. Biro Klasifikasi Indonesia adalah Badan Klasifikasi yang independen dan mengatur diri sendiri, BKI tidak memiliki kepentingan terhadap aspek komersial terkait dengan desain kapal, pembangunan kapal, kepemilikan kapal, operasional kapal, manajemen kapal, perawatan/perbaikan kapal, asuransi atau persewaan. BKI juga melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu dan standar teknik yang dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jasa klasifikasi kapal.</p>		
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada		
9. SUMBER DATA	:	Laporan Hasil Survey Biro Klasifikasi Indonesia		
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
				<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13.

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

2. INDIKATOR KINERJA : **Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)**

- 3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA** :
- a. Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran untuk mengukur kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada yang dituangkan dalam sebuah laporan supervisi dengan target indeks 80
 - b. Pengukuran dilakukan berdasarkan nilai indeks kegiatan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan SDKP
 - c. Sarana Pengawasan SDKP yang dinilai meliputi : Kapal Pengawas Kelas III sebanyak 12 unit, Kapal Pengawas Kelas IV sebanyak 10 unit dan Kapal Pengawas Kelas VI sebanyak 87 unit (*Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat*). Penyelesaian Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP meliputi perawatan pencegahan, perawatan prediktif dan perawatan darurat.
 - d. [Supervisi dapat dilaksanakan secara daring dan/atau kunjungan langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP.](#)
 - e. Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP meliputi:
 - 1) Indeks Supervisi Kapal pengawas Kelas III dan Kelas IV (bobot nilai **70%**),
 - 2) Indeks Supervisi Kapal Pengawas Kelas V (bobot nilai **30 %**).

Formula:

$$N_s = (70\% \cdot s_a) + (30\% \cdot s_b)$$

Keterangan:

N_s = Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan SDKP

s_a = Nilai Supervisi pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas kelas III dan kelas IV

Kriteria Capaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

s_b = Nilai Supervisi pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas kelas V

FORM KAPAL PENGAWAS UNIT KERJA TAHUN ANGGARAN : TARGET SUPERVISI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP
: KELAS III DAN IV
: DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
: 2023

NO	NAMA KAPAL	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PREVENTIF				PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PREDIKTIF				DARURAT PEKERJAAN DARURAT
		RUTIN	PENGEDOKAN/ PELIMBUNGAN	SERVIS/ PERBAIKAN	PENGECEKAN	OVERHAUL	SUKU CADANG	PERLENGKAPAN	REPOWERING	
Kapal Kelas III										
1	Hiu Macan 01	12	0	2	1	1	12	1	0	1
2	Hiu Macan 03	12	0	2	1	1	12	1	0	1
3	Hiu Macan 04	12	0	2	1	1	12	1	0	1
4	Hiu Macan 05	12	1	2	1	1	12	1	0	1
5	Hiu Macan 06	12	0	2	1	1	12	1	0	1
Kapal Kelas IV										
6	Hiu 01	12	0	2	1	1	12	1	0	1
7	Hiu 02	12	0	2	1	1	12	1	0	1
8	Hiu 03	12	1	2	1	1	12	1	0	1
9	Hiu 04	12	0	2	1	1	12	1	0	1
10	Hiu 05	12	0	2	1	1	12	1	0	1
11	Hiu 06	12	1	2	1	1	12	1	0	1
12	Hiu 07	12	0	2	1	1	12	1	0	1
13	Hiu 08	12	0	2	1	1	12	1	0	1
14	Hiu 09	12	0	2	1	1	12	1	0	1
15	Hiu 10	12	1	2	1	1	12	1	0	1
16	Hiu 11	12	0	2	1	1	12	1	0	1
17	Hiu 12	12	1	2	1	1	12	1	0	1
18	Hiu 13	12	1	2	1	1	12	1	0	1

19	Hiu 14	12	0	2	1	1	12	1	0	1
20	Hiu 15	12	0	2	1	1	12	1	0	1
21	Hiu 16	12	1	2	1	1	12	1	0	1
22	Hiu 17	12	0	2	1	1	12	1	0	1
JUMLAH		264	7	44	22	22	264	22	0	22

$$S_a = \sum_{i=1}^n \left(\frac{U}{K} \right)$$

S_a : Nilai Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas Kelas III dan kelas IV

n : Jumlah Kapal Kelas III dan Kelas IV

U : Nilai Hasil Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Preventif, Pemeliharaan dan Perawatan Prediktif dan Darurat setiap Kapal

K : Total Nilai Hasil Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Preventif, Pemeliharaan dan Perawatan Prediktif dan Darurat

FORM : TARGET SUPERVISI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP
KAPAL PENGAWAS : KELAS V
UNIT KERJA : DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	NAMA KAPAL	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PREVENTIF	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PREDIKTIF	DARURAT
		RUTIN	SUKU CADANG	PEKERJAAN DARURAT
1	Napoleon 036	12	12	1
2	Napoleon 045	12	12	1
3	Dolphin STBL 01	12	12	1
4	KP. Kakap	12	12	1
5	RIB	12	12	1
6	Dolphin 08	12	12	1
7	Dolphin 015	12	12	1
8	Dolphin 018	12	12	1
9	Dolphin 023	12	12	1
10	Dolphin 024	12	12	1
11	Napoleon 015	12	12	1
12	Napoleon 016	12	12	1
13	Napoleon 027	12	12	1
14	Napoleon 035	12	12	1
15	PRL	12	12	1
16	SEA RIDER	12	12	1
17	RUBBER BOAT	12	12	1
18	HIU BIRU 01	12	12	1
19	HIU BIRU 02	12	12	1
20	Dolphin 04	12	12	1
21	Napoleon 06	12	12	1
22	Napoleon 014	12	12	1

23	Napoleon 052	12	12	1
24	Sea Rider 1	12	12	1
25	HIU BIRU 03	12	12	1
26	RUBER BOAT	12	12	1
27	Dolphin 03	12	12	1
28	Dolphin 019	12	12	1
29	Dolphin 026	12	12	1
30	Napoleon 030	12	12	1
31	Napoleon 031	12	12	1
32	Napoleon 056	12	12	1
33	Albacore 01	12	12	1
34	RIB	12	12	1
35	RUBERBOAT	12	12	1
36	RUBERBOAT	12	12	1
37	RUBERBOAT	12	12	1
38	RUBERBOAT	12	12	1
39	RUBERBOAT	12	12	1
40	RUBERBOAT	12	12	1
41	RUBERBOAT	12	12	1
42	Marlin 03	12	12	1
43	Marlin 09	12	12	1
44	Dolphin 029	12	12	1
45	Napoleon 12	12	12	1
46	Napoleon 033	12	12	1
47	Napoleon 034	12	12	1
48	RIB	12	12	1
49	RUBERBOAT	12	12	1
50	Dolphin 014	12	12	1
51	Napoleon 028	12	12	1
52	Napoleon 054	12	12	1

53	HIU BIRU 04	12	12	1
54	RUBERBOAT	12	12	1
55	Napoleon 03	12	12	1
56	Napoleon 037	12	12	1
57	Napoleon 038	12	12	1
58	RIB	12	12	1
59	TB.01	12	12	1
60	Marlin 05	12	12	1
61	Marlin 07	12	12	1
62	Dolpin 017	12	12	1
63	RIB 03	12	12	1
64	RIB	12	12	1
65	Napoleon 017	12	12	1
66	Napoleon 039	12	12	1
67	Napoleon 040	12	12	1
68	TENGGIRI (8M)	12	12	1
69	Napoleon 051	12	12	1
70	Napoleon 055	12	12	1
71	Dolphin 016	12	12	1
72	Napoleon 041	12	12	1
73	RUBER BOAT	12	12	1
74	RUBER BOAT	12	12	1
75	Dolphin 028	12	12	1
76	Napoleon 07	12	12	1
77	Napoleon 023	12	12	1
78	Napoleon 053	12	12	1
79	Marlin 014	12	12	1
80	Napoleon 018	12	12	1
81	Napoleon 025	12	12	1
82	Napoleon 042	12	12	1

83	Napoleon 049	12	12	1
84	Napoleon 050	12	12	1
85	Albacore 02	12	12	1
86	Sea Rider	12	12	1
87	Rubber Boat	12	12	1
88				
89				
90				
91				
JUMLAH		1044	1044	87

$$S_b = \sum_{i=1}^n \left(\frac{U_n}{K} \right)$$

S_b : Nilai Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas Kelas V

n : Jumlah Kapal Kelas V

U : Nilai Hasil Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Preventif, Pemeliharaan dan Perawatan Prediktif dan Darurat setiap Kapal

K : Total Nilai Hasil Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Preventif, Pemeliharaan dan Perawatan Prediktif dan Darurat

DAFTAR ASSET KAPAL PENGAWAS DITJEN PSDKP 2023 :

No	Kapal Pengawas	Class	No	Kapal Pengawas	Class	No	Kapal Pengawas	Kelas
Direktorat POA			Pangkalan PSDKP Batam			Pangkalan PSDKP Bitung		
1	KP. Orca 01	I	1	KP. Hiu Macan 05	III	1	KP. Hiu 02	IV
2	KP. Orca 02	I	2	KP. Hiu 03	IV	2	KP. Hiu 05	IV
3	KP. Orca 03	I	3	KP. Hiu 17	III	Stasiun PSDKP Tarakan		
4	KP. Orca 04	I	Pangkalan PSDKP Jakarta			1	KP. Hiu 07	IV
5	KP. Hiu Macan Tutul 01	II	1	KP. Hiu 06	IV	Stasiun PSDKP Tahuna		
6	KP. Hiu Macan Tutul 02	II	2	KP. Hiu 10	IV	1	KP Hiu 15	III
7	KP. Paus 01	II	Stasiun PSDKP Cilacap			Stasiun PSDKP Kupang		
8	KP. Akar	V	1	KP. Hiu 04	IV	1	KP. Hiu Macan 03	III
Pangkalan PSDKP Lampulo			Stasiun PSDKP Pontianak			Stasiun PSDKP Ambon		
1	KP Hiu 12	III	1	KP. Hiu Macan 01	III	1	KP. Hiu 13	III
Stasiun PSDKP Belawan			2	KP. Hiu 11	III	Pangkalan PSDKP Tual		
1	KP. Hiu 01	IV				1	KP. Hiu Macan 06	III
2	KP. Hiu 08	IV				2	KP. Hiu 14	III
3	KP. Hiu 16	III				Stasiun PSDKP Biak		
						1	KP. Hiu Macan 04	III

4. SATUAN PENGUKURAN

: Nilai

5. JENIS ASPEK TARGET

: (√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK

: (√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome

7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Pencapaian IKU ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat POA bersumber dari hasil supervisi terhadap penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP meliputi perawatan pencegahan, perawatan prediktif dan perawatan darurat. Kapal Pengawas Kelas III sebanyak 12 unit, Kapal Pengawas Kelas IV sebanyak 10 unit dan Kapal Pengawas Kelas VI sebanyak 91 unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat). Sehingga validitas IKU ini output kendali tinggi.		
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada		
9. SUMBER DATA	:	Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Rutin Bulanan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, Laporan Stock Opname Suku Cadang, Teknikal Analysis		
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Nilai supervisi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kegiatan supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP di lingkungan Ditjen PSDKP;</p> <p>Supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP adalah penilaian kegiatan Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi.</p> <p>Prasarana pengawasan SDKP sesuai dengan Perdirjen PSDKP nomor 10/DJPSDKP/2020 tentang Penyiapan Prasarana Pengawasan SDKP terbagi menjadi dua jenis yaitu prasarana pengawasan SDKP utama dan pendukung.</p> <p>Pembangunan dilaksanakan oleh UPT Ditjen PSDKP dan disupervisi oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada selaku pembina teknis kegiatan.</p> <p>Supervisi dapat dilaksanakan secara daring dan/atau kunjungan langsung ke lokasi pembangunan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian dan ketersediaan dokumen pembangunan prasarana pengawasan SDKP.</p> <p>Penilaian kegiatan Perencanaan Teknis didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Perencana yang terdiri dari Gambar Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS) dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).</p> <p>Penilaian kegiatan Pelaksanaan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang terdiri dari laporan kegiatan pembangunan, <i>shop drawing</i>, jadwal kerja/kurva S, <i>as built drawing</i>.</p> <p>Penilaian kegiatan Pengawasan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Pengawas yang terdiri dari laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.</p>

Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP memiliki target nilai 80.

- a. Variabel penilaian supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP, yaitu:
- perencanaan teknis (bobot 40);
 - pelaksanaan konstruksi (bobot 40);
 - pengawasan konstruksi (bobot 20).

Formula:

$$\sum_{nsp4} = \frac{A1 + A2 + A3 + \dots \dots An}{n}$$

$$A1 \dots An : (50\% \cdot x_a) + (25\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c)$$

Keterangan:

\sum_{nsp4} = : Nilai supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

$A1 \dots An$: Nilai supervisi penyelesaian pembangunan setiap unit prasarana pengawasan SDKP

x_a : Nilai supervisi perencanaan teknis penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

x_b : Nilai supervisi pelaksanaan konstruksi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

x_c : Nilai supervisi pengawasan konstruksi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

n : Jumlah prasarana pengawasan SDKP yang dibangun

Kriteria Capaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

Penjelasan Bobot:

NO	Jenis Dokumen	Dokumen	Nilai (%)	Bobot
1	Perencanaan Teknis	Gambar Teknis	10	40
		Rincian Anggaran Biaya (RAB)	10	
		Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKSS)	10	
		Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	10	
2	Pembangunan Kosntruksi	Shop drawing (Gambar Kerja Awal)	10	40
		Kurva S (Jadwal Pembangunan Project)	10	
		Laporan (Kontraktor)	10	
		Asbuilt Drawing (Gambar Kerja Akhir)	10	
3	Pengawasan Pembangunan	Laporan Mingguan	10	20
		Laporan Bulanan	10	

4. SATUAN PENGUKURAN

: Nilai

5. JENIS ASPEK TARGET

: () Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK

: (√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome

7. PENJELASAN VALIDITAS

a. Pencapaian IKU ini diukur secara mandiri oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada bersumber dari kegiatan supervisi penilaian terhadap kesesuaian dan ketersediaan dokumen pembangunan prasarana SDKP di UPT Ditjen PSDKP.

- b. Supervisi penilaian terhadap kesesuaian dan ketersediaan dokumen pembangunan prasarana SDKP ini dimaksudkan untuk memastikan kegiatan penyelesaian pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal dan aturan yang berlaku.
- c. Sehingga, validitas IKU ini output kendali tinggi.
- d. Apabila pembangunan prasarana pengawasan SDKP mengalami blokir anggaran, maka tidak dilakukan penilaian.

8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan supervisi penilaian penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 2. Dokumen perencanaan teknis pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 3. Dokumen pelaksanaan konstruksi pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 4. Dokumen pengawasan konstruksi pembangunan prasarana pengawasan SDKP.
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 15.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi yang dihasilkan bidang pemantauan dan operasi armada (inovasi)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.</p> <p>Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara</p> <p>Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, dan berkelanjutan</p> <p>Kelompok inovasi: umum, khusus</p> <p>Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)</p> <p>Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)</p> <p>Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan</p> <p>Pengukuran Capaian:</p>

Inovasi dihitung dari jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di tingkat Ditjen PSDKP

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Inovasi
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA dan capaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Tim Kerja Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan.• Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan.• Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i>.

Formula:

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA

x_n : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP.

n : jumlah target rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan.

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	a. Identifikasi substansi b. Outline c. Zero drat
2	Pelaksanaan	70	a. Pembahasan draft b. Uji publik draft c. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pelaporan	15	Laporan dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat POA
8. SUMBER DATA	:	Draft NSPK yang disusun lingkup prasarana dan sarana
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 17.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.</p> <p>b. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.</p> <p>c. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>d. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.</p>
		<p>Formula:</p> $X = \frac{a}{b} \times 100$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi

b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA, sehingga validitas IK yang dipilih Output Kendali Tinggi
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 18.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">● Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;● Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:● Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)● Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:● Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)● Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)● Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)● Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)

- e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)
 - Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
 - b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
 - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
- Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

- ASN Struktural :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat Fungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Staf :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA, sehingga validitas IK yang dipilih Output Kendali Tinggi
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Aplikasi SIMPEG Online KKP; Aplikasi E-SKP
10. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (√) Buat Baru

13. POLARISASI : Maximize Minimize Stabilize

14. PERIODE PELAPORAN : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">a. Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasib. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerjac. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:<ul style="list-style-type: none">• Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyediaan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja• Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

CARA PENGUKURAN CAPAIAN

$$SKOR_{REKON} = \text{Nilai kepatuhan} + \text{Nilai kesesuaian} + \text{Nilai ketercapaian}$$

Nilai Kepatuhan:

$$Nilai_{kepatuhan} = 30\% \times \frac{\text{Dokumen yang ada}}{\text{Total dokumen yang dibutuhkan}} \times 100$$

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Perjanjian Kinerja
2. Manual IKU/Informasi Indikator Kinerja
3. Rincian Target IKU
4. Rencana Aksi
5. LKJ/LCK
6. Data Dukung LKJ/LCK

Nilai Kesesuaian:

$$Nilai_{kesesuaian} = 30\% \times \frac{\text{Nilai kriteria dokumen yang disandingkan}}{\text{Total dokumen yang disandingkan}}$$

Kriteria dokumen yang disandingkan:

Target:

- A. PK – LKJ/LCK
- B. LKJ/LCK – Kinerja
- C. PK – Kinerja

Realisasi:

- D. LKJ/LCK TW I – Kinerja
- E. LKJ/LCK TW II – Kinerja
- F. LKJ/LCK TW III – Kinerja

Informasi data:

- G. Manual IKU – Kinerja
- H. Rincian Target – Kinerja

Nilai Ketercapaian:

$$Nilai_{ketercapaian} = 40\% \times \frac{\text{Rata - rata NPSS triwulanan}}{120} \times 100$$

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA dengan menggunakan LKE, pencapaian target dipengaruhi secara dominan oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Hasil Pengukuran mandiri lingkup Direktorat POA
10. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir

12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat POA berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2021 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2022 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.
		ΣN : Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA, capaian secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)• Unit Kerja lingkup Direktorat POA
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir

12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat POA tahun 2023 • Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah; 2. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku; 3. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan 4. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.
Formula:		
$f = \frac{x}{y} \times 100\%$		
Keterangan:		
<i>f</i>	:	Persentase Realisasi Anggaran
<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2023
<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Tanpa Blokir)
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA dan pencapaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.		
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada		
9. SUMBER DATA	:	a. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) b. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Laporan Monitoring Kegiatan Kontraktual d. Laporan Monitoring Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan e. Laporan Monitoring Deviasi halaman III DIPA		
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
				<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 22.

)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. • Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA dan capaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 23.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">● Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.● Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:<ul style="list-style-type: none">○ Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;○ Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);○ Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf● UKURAN : Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu:<ul style="list-style-type: none">a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);● CARA MENGUKUR :<ul style="list-style-type: none">a) Menggunakan Aplikasi Bitrixb) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkanc) Pengukuran dokumen:<ul style="list-style-type: none">a. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahunb. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulanc. Renaksi Kinerjad) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulane) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi.f) Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan.

- g) Rekonsiliasi realisasi dengan **mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan.**
- h) Pengukuran level 1 dihitung dengan **lingkup pejabat pusat.**
- i) **Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif** pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan **nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.**

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur oleh Sekretariat Ditjen PSDKP akan tetapi dalam pencapaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Aplikasi Bitrix bitrix24.com
10. STATUS DATA	:	() Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize () Minimize () Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 24.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022; 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019; 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur oleh Inspektorat Jenderal KKP akan tetapi dalam pencapaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP

10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 25.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur oleh Inspektorat Jenderal KKP akan tetapi dalam pencapaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
10. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir

12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan



**Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2023**